

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi modern, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu dan umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Menurut Solow (1956), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang berkontribusi terhadap peningkatan output perekonomian.

Perkembangan teori pertumbuhan endogen kemudian memperluas pandangan tersebut dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia, investasi, dan inovasi sebagai faktor penting yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Romer, 1986). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia dan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang penting karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi. Dengan demikian, analisis mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu provinsi dengan capaian pembangunan manusia terbaik di Indonesia, namun di balik prestasi tersebut terdapat paradoks yang menarik perhatian. Meskipun IPM DIY secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 mencatatkan angka tertinggi se-Jawa, kesejahteraan masyarakat yang diharapkan turut meningkat secara merata justru belum sepenuhnya terwujud di seluruh kabupaten/kota. Ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan DIY masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, di mana kabupaten-kabupaten di sisi selatan seperti Gunungkidul dan Kulon Progo tertinggal cukup jauh dibandingkan Kota Yogyakarta dan Sleman dalam berbagai aspek ekonomi. Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor apa sesungguhnya yang mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah DIY, sehingga kajian mengenai pengaruh investasi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi DIY menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Secara nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,03 persen dan meningkat menjadi 5,11 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan

ekonomi global. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi menunjukkan variasi yang cukup besar. Pada tahun 2024, beberapa provinsi mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi seperti Maluku Utara sebesar 13,92 persen, Papua Barat sebesar 20,80 persen, dan Sulawesi Tengah sebesar 9,89 persen. Sebaliknya, beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah seperti Kepulauan Bangka Belitung yang hanya tumbuh sebesar 0,77 persen.

Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dalam menghasilkan pertumbuhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi suatu wilayah. Untuk memperoleh gambaran mengenai posisi kinerja ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan provinsi lain di Indonesia, maka disajikan tabel perbandingan laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dan nasional sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi lain dan Nasional (Indeks)

Provinsi	2024	2025
Aceh	4,66	2.97
Sumatera Utara	5,03	4.53
Sumatera Barat	4,37	3.37
Riau	3,52	4.79
Jambi	4,50	4.93
Sumatera Selatan	5,03	5.35
Bengkulu	4,62	4.80

Provinsi	2024	2025
Lampung	4,57	5.28
Kep. Bangka Belitung	0,77	4.09
Kep. Riau	5,02	6.94
DKI Jakarta	4,91	5.21
Jawa Barat	4,95	5.32
Jawa Tengah	4,95	5.37
DI Yogyakarta	5.03	5.49
Jawa Timur	4,93	5.33
Banten	4,79	5.37
Bali	5,48	5.82
NTB	5,30	3.22
NTT	3,87	5.14
Kalimantan Barat	4,90	5.39
Kalimantan Tengah	4,46	4.80
Kalimantan Selatan	5,06	5.22
Kalimantan Timur	6,17	4.53
Kalimantan Utara	4,73	4.56
Sulawesi Utara	5,39	5.66
Sulawesi Tengah	9,89	8.47
Sulawesi Selatan	5,02	5.43
Sulawesi Tenggara	5,40	5.79
Gorontalo	4,13	5.71
Sulawesi Barat	4,76	5.36
Maluku	5,34	4.56
Maluku Utara	13,92	34.17
Papua Barat	20,80	6.46
Papua	4,11	4.03
Papua Barat Daya	3,60	3.97
Papua Selatan	5,09	3.39
Papua Tengah	4,36	-21.80
Papua Pegunungan	4,75	3.75
Nasional	5,03	5,11

Sumber: Badan Pusat Statistik

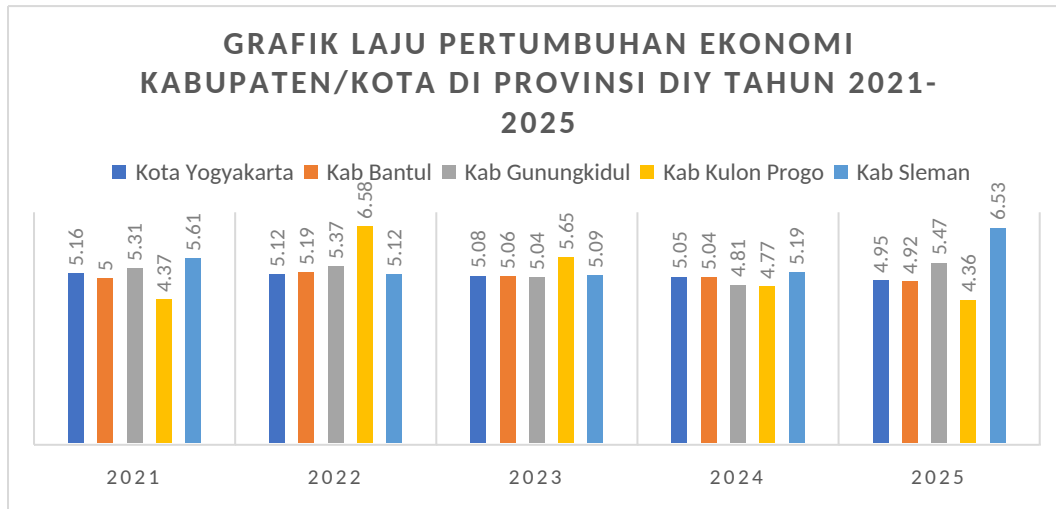
Berdasarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tabel 1.1, Provinsi DIY membukukan pertumbuhan sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan mengalami akselerasi menjadi 5,49% pada tahun 2025. Kinerja makro ini menempatkan DIY pada posisi yang relatif moderat di skala nasional. Nilai LPE DIY tercatat melampaui performa beberapa wilayah pertumbuhan utama di Pulau Jawa, seperti

DKI Jakarta (4,91%) dan Jawa Timur (4,93%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada jauh di bawah wilayah-wilayah dengan pertumbuhan berbasis komoditas tinggi, seperti Sulawesi Tengah (9,89% pada tahun 2024) serta Maluku Utara yang mencatat lonjakan masif dari 13,92% pada 2024 menjadi 34,17% pada 2025. Di kutub berbeda, fluktuasi regional ditandai dengan kontraksi tajam pada perekonomian Papua Tengah yang merosot hingga -21,80% pada tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, kinerja ekonomi DIY menunjukkan tren yang lebih baik pada tahun 2025. Pada tahun 2024, LPE DIY sebesar 5,03% berada tepat pada level yang sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Namun pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi DIY meningkat menjadi 5,49% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi DIY berlangsung lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional, yang mengindikasikan terjaganya dinamika aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya kontribusi sektor-sektor penggerak pertumbuhan di wilayah DIY.

Meskipun demikian, data pada tingkat provinsi belum mampu menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi secara lebih rinci karena masih terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di dalam Provinsi DIY. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pada tingkat/kabupaten kota sebagaimana disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi DIY (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang beragam antarwilayah. Kabupaten Sleman secara konsisten menjadi daerah dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Setelah mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada tahun 2021, Kabupaten Sleman mencatat pertumbuhan sebesar 6,53 persen pada tahun 2025 yang merupakan angka tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di DIY. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman diduga berkaitan dengan perannya sebagai pusat pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan, jasa, dan investasi yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, keberadaan berbagai destinasi wisata unggulan dan infrastruktur yang relatif lebih maju turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,58 persen pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kemudian mengalami perlambatan hingga mencapai 4,36 persen pada tahun 2025, yang merupakan angka terendah di antara seluruh kabupaten/kota di DIY. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo belum berlangsung secara konsisten. Fluktuasi tersebut dapat mencerminkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi produktif serta belum meratanya pemanfaatan potensi ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Fenomena menarik lainnya terlihat pada Kota Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan jasa di Provinsi DIY. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan menurun selama periode pengamatan, yaitu dari 5,16 persen pada tahun 2021 menjadi 4,95 persen pada tahun 2025. Meskipun penurunannya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan tidak selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Struktur ekonomi Kota Yogyakarta yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan menyebabkan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh dinamika konsumsi masyarakat, mobilitas penduduk, serta perkembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlambatan yang terjadi mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan laju ekspansi ekonomi pada wilayah yang telah berkembang relatif maju.

Secara keseluruhan, data pada Gambar 1.1 menunjukkan adanya disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2025, selisih antara daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Kabupaten Sleman sebesar 6,53 persen, dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,36 persen, mencapai sekitar 2,17 poin persentase. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah di DIY. Variasi pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi daerah secara berbeda pada masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas pembangunan manusia, partisipasi angkatan kerja, investasi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas pariwisata pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi daerah secara berbeda. Salah satu faktor yang secara teoritis berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu faktor yang secara teoritis diyakini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kualitas pembangunan manusia. Dalam teori pertumbuhan endogen, modal manusia (human capital) dipandang sebagai sumber utama peningkatan produktivitas dan inovasi yang mampu menciptakan

pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1986). Kualitas pembangunan manusia umumnya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi kualitas manusia yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, IPM sering digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kesiapan suatu wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk melihat posisi kualitas pembangunan manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan wilayah lain di Indonesia, maka disajikan perbandingan nilai IPM provinsi-provinsi di Indonesia dan nasional sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi lain dan Nasional

Provinsi	2024	2025
Aceh	75,36	76,23
Sumatera Utara	75,76	76,47
Sumatera Barat	76,43	77,27
Riau	75,67	76,31
Jambi	74,36	75,13
Sumatera Selatan	73,84	74,76
Bengkulu	74,91	75,68
Lampung	73,13	73,98
Kepulauan Bangka Belitung	74,55	75,26
Kepulauan Riau	79,89	80,53
DKI Jakarta	84,15	85,05
Jawa Barat	74,92	75,90
Jawa Tengah	73,87	74,77
DI Yogyakarta	81,62	82,48
Jawa Timur	75,35	76,13
Banten	76,35	77,25
Bali	78,63	79,37
Nusa Tenggara Barat	73,10	73,97
Nusa Tenggara Timur	69,14	69,89

Provinsi	2024	2025
Kalimantan Barat	71,19	72,09
Kalimantan Tengah	74,28	74,86
Kalimantan Selatan	75,19	76,10
Kalimantan Timur	78,79	79,39
Kalimantan Utara	73,41	74,04
Sulawesi Utara	75,68	76,32
Sulawesi Tengah	72,24	72,82
Sulawesi Selatan	75,18	75,92
Sulawesi Tenggara	73,62	74,25
Gorontalo	72,01	72,62
Sulawesi Barat	70,46	71,16
Maluku	73,40	74,09
Maluku Utara	71,84	72,52
Papua Barat	67,69	68,48
Papua Barat Daya	69,65	70,55
Papua	73,83	74,69
Papua Selatan	68,86	69,54
Papua Tengah	60,25	60,64
Papua Pegunungan	54,43	54,91
Nasional	75,02	75,90

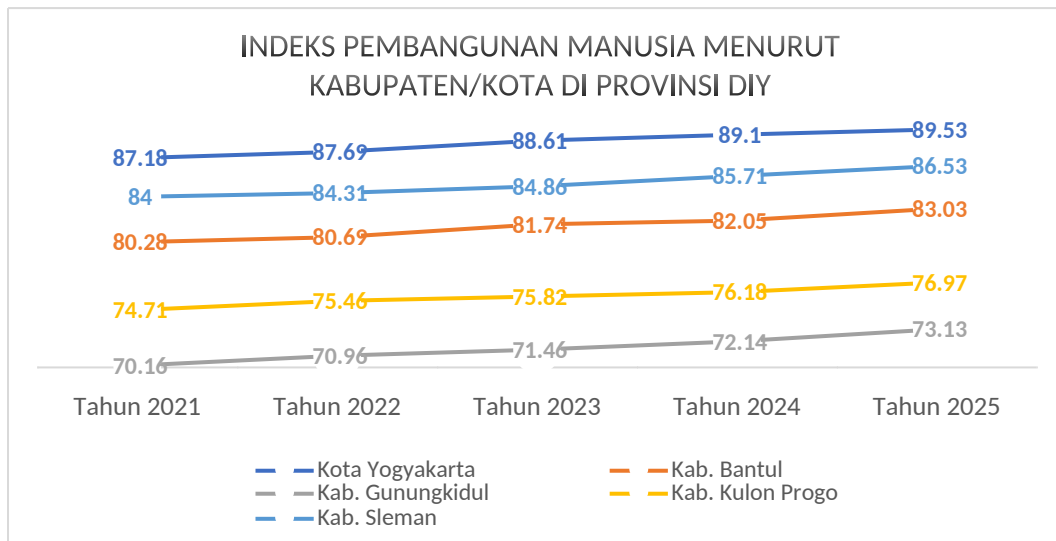
Sumber : Badan Pusat Statistik

Merujuk pada data Tabel 1.2, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara konsisten menduduki posisi superior dalam capaian IPM secara nasional. Pada kurun waktu 2024 hingga 2025, IPM DIY mengalami eskalasi dari 81,62 menjadi 82,48, yang menempatkannya di peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta (84,15 pada 2024 dan 85,05 pada 2025). Akumulasi nilai tersebut melampaui rata-rata nasional dan porsi wilayah lain secara signifikan sebagai komparasi, Provinsi Papua Pegunungan hanya mencatat IPM sebesar 54,43 dan 54,91 pada periode yang sama. Bahkan di lingkup regional Pulau Jawa, capaian DIY berada di atas Jawa Barat (74,92), Jawa Tengah (73,87), dan Jawa Timur (75,35). Rekam jejak ini merefleksikan efektivitas pembangunan multidimensi DIY pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan standar hidup layak. Meskipun demikian, tingginya kualitas modal manusia ini

menghadirkan sebuah kondisi paradoksal, sebab DIY masih dihadapkan pada persentase kemiskinan yang relatif tinggi di Pulau Jawa. Kontradiksi antara tingginya IPM dan ketidakmampuan mereduksi kemiskinan secara optimal inilah yang menegaskan urgensi pemilihan DIY sebagai lokus penelitian, guna menelaah lebih dalam kontribusi riil dari IPM dan pemanfaatan angkatan kerja terhadap dinamika output ekonomi di level kabupaten/kota.

Analisis pada tingkat makro provinsi perlu diturunkan ke level unit analisis yang lebih mikro guna menangkap kondisi nyata pembangunan manusia yang sebenarnya di Provinsi DIY. Langkah ini krusial untuk menghindari bias agregat (*aggregation bias*), mengingat angka rata-rata provinsi tidak secara otomatis merefleksikan pemerataan pembangunan di seluruh area. Eksistensai lima kabupaten/kota di DIY membawa karakteristik sosio-ekonomi dan demografis tersendiri, yang pada gilirannya berimplikasi pada fluktuasi capaian IPM lokal. Untuk mengamati peta sebaran dan ketimpangan indikator tersebut secara lebih komprehensif, berikut dipaparkan data IPM kabupaten/kota pada kurun waktu 2021-2025:

Gambar 1. 2 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (Indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan diagram di atas, sebaran nilai IPM antar kabupaten/kota di DIY selama tahun 2021-2025 membentuk pola yang mapan namun menunjukkan kesenjangan antarwilayah yang cukup tajam. Sebagai sentral urban, Kota Yogyakarta menempati peringkat teratas secara absolut, dengan peningkatan dari 87,18 pada tahun 2021 menjadi 89,53 pada tahun 2025. Performa ini mengindikasikan kualitas modal manusia yang matang berkat dominasi infrastruktur sosial dan standar hidup layak. Pada kluster menengah, Kabupaten Sleman mencatatkan kenaikan dari 84,00 pada 2021 menjadi 86,53 pada 2025, yang disusul oleh Kabupaten Bantul (80,28 pada 2021 menjadi 83,03 pada 2025). Sebaliknya, performa di bawah rata-rata provinsi ditunjukkan oleh Kabupaten Kulon Progo yang bergerak dari angka 74,71 ke 76,97, serta Kabupaten Gunungkidul yang bertahan di posisi terbawah dengan perolehan 70,16 pada 2021 dan 73,13 pada 2025.

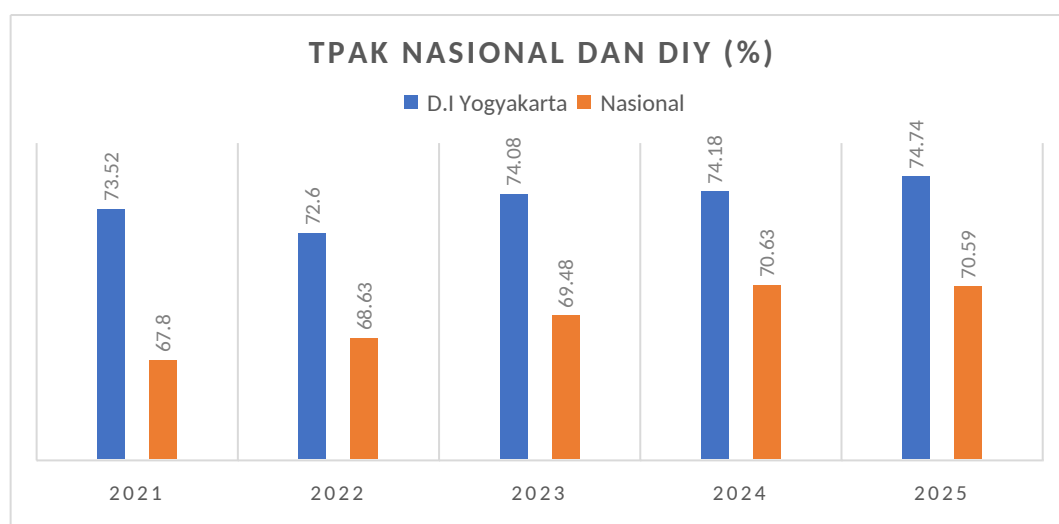
Walaupun secara umum seluruh daerah mengalami pertumbuhan IPM yang menjanjikan, disparitas antar wilayah terkaya (Kota Yogyakarta) dan wilayah dengan capaian terendah (Kabupaten Gunungkidul) masih menyisakan jarak yang signifikan, yaitu sekitar 16 poin pada akhir tahun pengamatan. Fenomena asimetri spasial ini mempertegas bahwa hasil-hasil pembangunan manusia di DIY masih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dan urban tertentu. Realitas empiris tersebut melandasi ketertarikan peneliti untuk menguji lebih jauh apakah diversifikasi mutu modal manusia antardaerah ini memicu pola ketimpangan yang sama pada laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Di samping kualitas sumber daya manusia, sisi kuantitas dari pasar tenaga kerja juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur hal ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sendiri merupakan persentase dari penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang masih aktif mencari kerja. Secara teori, angka TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di suatu daerah turut serta dalam proses produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan total output perekonomian daerah (BPS, 2024).

Meskipun demikian, kondisi TPAK di tingkat kabupaten/kota di DIY sebenarnya menyimpan persoalan yang cukup kompleks. Munculnya perbedaan angka TPAK yang nyata antarwilayah merefleksikan adanya variasi dalam struktur penduduk, tingkat perkotaan (urbanisasi), serta sifat pasar kerja setempat. Daerah-

daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo tentu memiliki pola partisipasi kerja yang berbeda dengan wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang ekonominya digerakkan oleh sektor jasa dan industri kreatif. Realitas ini menimbulkan sebuah pertanyaan krusial bagi peneliti apakah meningkatnya partisipasi angkatan kerja ini otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota, atau justru dampak ekonomi yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada karakteristik struktur ekonomi masing-masing daerah?

Gambar 1. 3 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi DIY dan Nasional (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

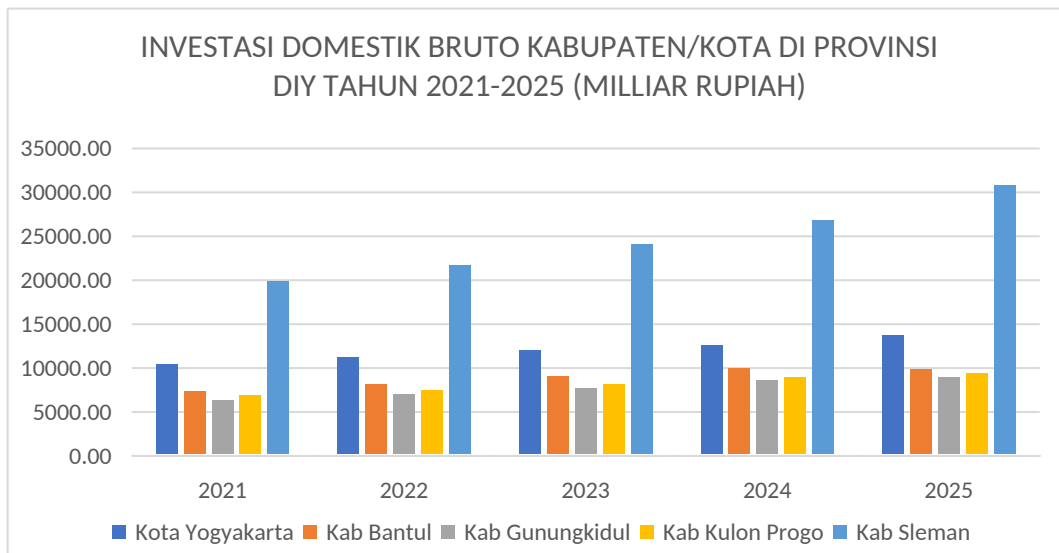
Berdasarkan Gambar 1.3, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibandingkan dengan nasional selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa IPM Provinsi DIY secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2021, IPM DIY tercatat sebesar 73,52, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 67,80. Meskipun mengalami penurunan menjadi 72,60 pada tahun 2022, nilai tersebut masih berada di atas rata-rata nasional sebesar

68,63. Selanjutnya, IPM DIY kembali meningkat menjadi 74,08 pada tahun 2023, 74,18 pada tahun 2024, dan 74,74 pada tahun 2025.

Sementara itu, IPM nasional juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat, yaitu dari 67,80 pada tahun 2021 menjadi 70,59 pada tahun 2025. Meskipun demikian, IPM Provinsi DIY tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi DIY relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, sehingga mendukung relevansi penelitian ini dalam mengkaji pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain kualitas sumber daya manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja, investasi merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam mendorong

Gambar 1. 4 Perkembangan Investasi Domestik Bruto Kab/Kota di Provinsi DIY (Milliar)



pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan neoklasik yang dikemukakan Solow (1956), akumulasi modal merupakan salah satu determinan utama peningkatan output ekonomi. Investasi mencerminkan penambahan kapasitas produksi melalui pembentukan modal baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan output, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, daerah yang mampu menarik dan mengembangkan investasi secara berkelanjutan umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagaimana berikut gambaran mengenai kondisi investasi kabupaten/kota di provinsi DIY :

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.4 Investasi Domestik Bruto kabupaten/kota di Provinsi DIY periode 2021–2025, seluruh wilayah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pascapandemi COVID-19. Kabupaten Sleman secara konsisten mencatatkan nilai investasi tertinggi, meningkat dari Rp19.815,67 miliar pada 2021 menjadi Rp30.763,67 miliar pada 2025, jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Kota Yogyakarta menempati posisi kedua dengan peningkatan dari Rp10.397,40 miliar menjadi Rp13.695,57 miliar, diikuti Kabupaten Bantul yang tumbuh dari Rp7.377,61 miliar menjadi Rp9.850,86 miliar. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul mencatat nilai investasi yang relatif lebih rendah, masing-masing meningkat dari Rp6.921,51 miliar menjadi Rp9.375,09 miliar dan dari Rp6.364,90 miliar menjadi Rp8.923,72 miliar pada periode yang sama. Kesenjangan nilai investasi yang cukup besar antar wilayah ini mengindikasikan adanya konsentrasi aktivitas investasi yang masih terpusat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sehingga mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peran investasi menjadi semakin relevan mengingat struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur dan modal fisik yang memadai. Tanpa adanya investasi yang cukup, kualitas sumber daya manusia yang tinggi berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas produksi dan lapangan kerja produktif. Dengan demikian, investasi tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan secara langsung,

tetapi juga sebagai faktor pendukung yang memungkinkan modal manusia dan tenaga kerja berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menemukan bahwa investasi dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tingkat partisipasi angkatan kerja tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan tergantung pada karakteristik wilayah dan periode yang diteliti (Al Faruq, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa investasi dan indeks pembangunan manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi regional, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja produktif, di mana tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu memberikan kontribusi optimal terhadap output ekonomi apabila tidak diimbangi kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang memadai (Rani, Syapsan & Tampubolon, 2024; Argarani & Fitriani, 2024). Sementara itu, hasil penelitian yang mengkaji hubungan IPM dan partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia belum tentu secara langsung meningkatkan partisipasi angkatan kerja apabila tidak didukung oleh iklim investasi yang kondusif di daerah tersebut.

Meskipun demikian, penelitian yang secara simultan menguji pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan cakupan periode 2020–2025 masih relatif terbatas.

Periode tersebut menjadi penting untuk dikaji karena mencerminkan dinamika perekonomian daerah pada masa pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan pascapandemi. Rentang waktu ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai perubahan kondisi ekonomi akibat guncangan pandemi serta proses pemulihan yang terjadi pada berbagai kabupaten/kota di DIY.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat pemerintah daerah mendorong pembangunan berbasis sumber daya manusia sebagai strategi utama peningkatan daya saing regional. Namun, tanpa pemahaman empiris mengenai sejauh mana modal manusia benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis berbasis data dan pendekatan ekonometrika diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kondisi struktural ekonomi DIY.

Sebagai daerah yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia, DIY seharusnya memiliki kapasitas pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dan stabil. Namun, dinamika pertumbuhan yang fluktuatif selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat linear dan sederhana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB ADHK, pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

pengembangan model pertumbuhan ekonomi regional berbasis modal manusia serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2025?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2025.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, investasi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2025, baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi regional dan ekonomi pembangunan, khususnya dalam memperkaya bukti empiris mengenai peran investasi, indeks pembangunan manusia dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori pertumbuhan ekonomi dan realitas empiris di daerah dengan karakteristik modal manusia yang relatif tinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan partisipasi tenaga kerja, dan alokasi investasi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan. Berikut beberapa manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kurikulum dan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait teori pertumbuhan ekonomi, ekonomi regional, serta ekonomi sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara indeks pembangunan manusia, investasi, partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi pada level provinsi.

2. Bagi Instansi/Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi partisipasi angkatan kerja. Temuan penelitian ini dapat mendukung penyusunan strategi pembangunan yang lebih berbasis pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan kapasitas indeks pembangunan manusia di Provinsi DIY

3. Bagi Masyarakat Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi regional.

4. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan modal manusia, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

5. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai analisis empiris dalam ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh indeks pembangunan manusia dan partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam penelitian ilmiah yang sistematis dan terukur.